DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jum'at 14 Maret 2025

RINGKASAN BERITA HARI INI

Saat Lebaran, Jangan Ada Jalan Rusak

CAMAT -camat yang berada di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo saat ini harus bergerak dengan cepat. Karena Bupati Sidoarjo, Subandi, telah memerintahkan mereka, lewat pembiayaan PIWK atau pagu indikatip wilayah kecamatan. Anggaran ini untuk segera mem-

ke halaman 11

Pengendara Sering Lawan Arus di Frontage Road

Polisi Ancam Tilang Pelanggar

SIDOARJO - Dishub Sidoarjo memasang rambu larangan kendaraan melaju ke arah utara (Surabaya) di sejumlah titik frontage. Sebab jalan itu satu arah. Namun, berdasarkan pengamatan, masih banyak pelanggar yang nekat menerobos.

pun sering melakukan razia gabungan dengan polisi. "Kalau ada petugas, mereka tertib. Setelah ditinggal, melanggar lagi," keluhnya.

Kanit Kamsel Polresta Sidoarjo Iptu Ali Mubarok mengaku hampir setiap hari pihaknya menegur pelanggar di frontage road. Upaya persuasif ditempuh dengan harapan bisa menggugah hati mereka dan

PEMKAB SIDOARJO

KOMITMEN: Bupati Sidoarjo Subandi bersama Kepala Bappeprov Jatim Yasin *(kiri)* menandatangani hasil kesepakatan Musrenbang di Pendopo Delta Wibawa kemarin (13/3).

Tahun Depan, Pemkab Fokus Pemerataan Pembangunan

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Pemerataan pembangunan jadi salah satu fokusnya.

Nantinya, RKPD akan jadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 hingga 2030.

Bupati Sidoarjo Subandi

HASIL MUSRENBANG SIDOARJO

- Menata kawasan strategis nasional termasuk wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila
- Menata desa dan membangun kota
- Peningkatan daya saing dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya
- Peningkatan kualitas masyarakat dan lingkungan
- Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata
- Mewujudkan tata kelola yang bersih dan layanan prima

ILUSTRASI: JOKO TRIONO/ JAWA POS

SUMBER: PEMKAB SIDOARJO

BPBD SIDOARJO

SUSAH TERLEPAS: Petugas Rescue Damkar Pos Sidoarjo Kota berupaya melepas cincin di jari tangan ODGJ yang tersangkut kemarin (13/3).

Cincin Tersangkut, ODGJ Datangi Damkar

Safari Ramadan Kapolresta Sidoarjo

Jadi Momen Sampaikan Pesan Kamtibmas

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing foto bersama dengan takmir masjid usai safarai ramadan.

Sidoarjo, Memorandum

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing menggiatkan safari ramadan. Tujuannya, menjalin kedekatan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif.

Seperti yang dilakukan ketika mengunjung Masjid Al Ikhlas di Jalan Raya Cemengkalang, Kamis (13/3). Ada beberapa hal yang disampaikannya kepada takmir masjid.

Pesan kamtibmas yang disampaikan antara lain, menguatkan toleransi dan kerukunan antarumat, menjaga keamanan tempat ibadah dari bahaya kriminalitas serta menjamin rasa nyaman jemaah dalam menjalankan ibadah. Kapolresta berharap ramadan dapat dijadikan momentum untuk saling menghormati, guyub rukun, dan toleran antaragama.

"Agar takmir masjid dapat mengajak jemaah untuk menjadikan ramadan sebagai kesempatan untuk menguatkan kerukunan dan toleransi. Mari berlatih untuk saling menebar kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama," ajaknya.

Ia juga mengajak tokoh agama dan masyarakat guna membantu peran kepolisian. Yakni turut serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama ramadan. **(sud/Jok/epe)**

MITRA

Saat Lebaran, Jangan Ada Jalan Rusak

H. Subandi.

CAMAT -camat yang berada di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo saat ini harus bergerak dengan cepat. Karena Bupati Sidoarjo, Subandi, telah memerintahkan mereka, lewat pembiayaan PIWK atau pagu indikatip wilayah kecamatan. Anggaran ini untuk segera mem-

>> ke halaman 11

Sentil

SMAN 1 P

HARIAN Bhirawa

Saat Lebaran, Jangan Ada Jalan Rusak

Sambungan hal 1

perbaiki jalan di wilayahnya yang rusak, agar saat idul fitri 1446 H tahun 2025, warga bisa lewat dengan nyaman.

"Saat Lebaran, masyarakat banyak beraktivitas untuk bersilaturahmi. Jangan sampai mereka terganggu akibat jalan yang berlubang karena rusak," ujar Subandi, usai rapat koordinasi dengan 18 Camat, di ruang delta wicaksana, Setda Sidoarjo, Selasa (11/3) kemarin.

Agar perbaikan jalan tersebut cepat selesai dan lancar, para Camat segera melaporkan titik kerusakan jalan di tempatnya. Kemudian, berkoordinasi dengan OPD terkait, supaya segera ditindaklanjuti.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Sidoarjo, diperintahkan untuk segera melaksanakan perbaikan, sebab mengingat waktu menjelang Lebaran tahun 2025 yang semakin dekat.

"Seluruh jalan di kecamatan dan di desa, harus diperbaiki," perintahnya.

Pemkab Sidoarjo, menurut Bupati Subandi, telah menggandeng Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, dalam pemetaan jalan rusak di Sidoarjo itu.

Data pemetaan ini, menurut Subandi, akan sangat membantu Dinas PUBM Sidoarjo dalam menentukan prioritas perbaikan, terutama untuk jalan-jalan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, lingkungan, dan sosial. **[kus.gat]**

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

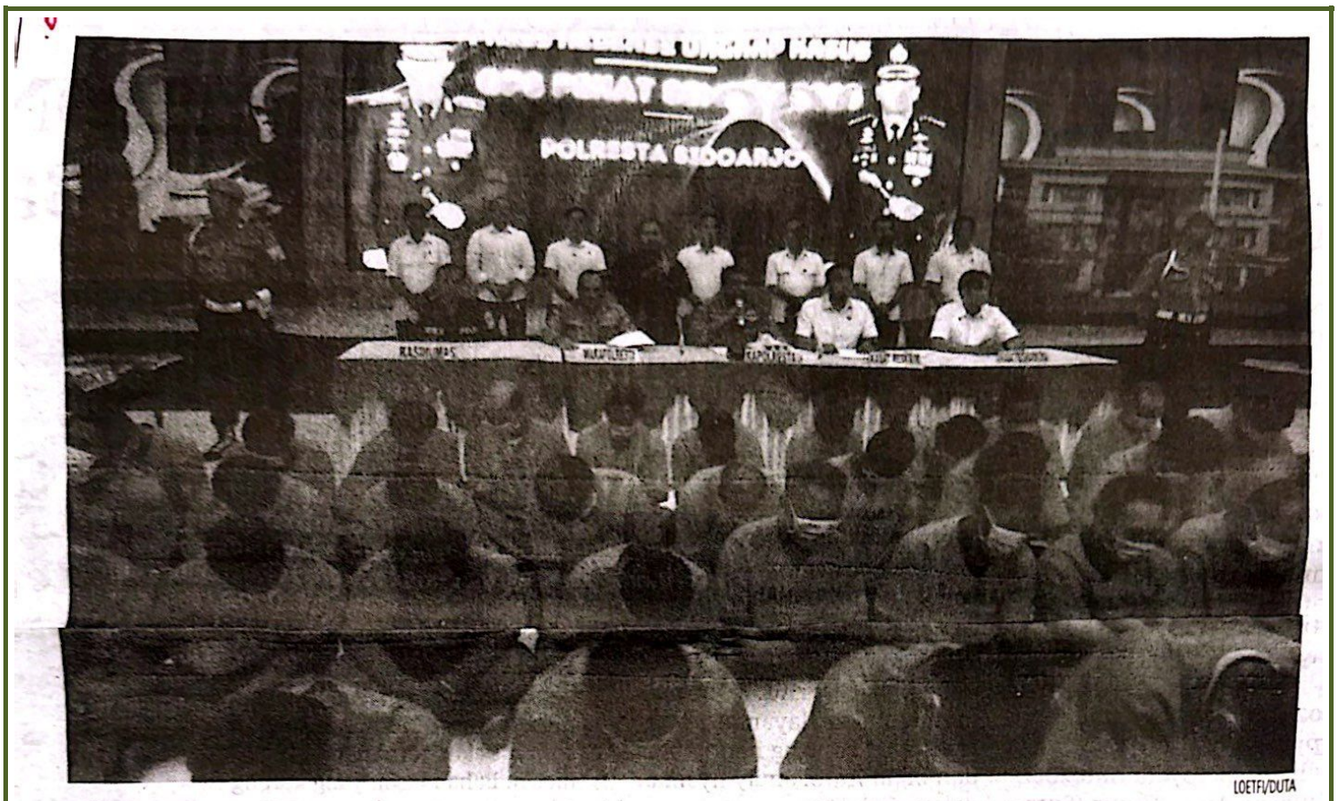

LOETFI/DUTA

Rilis Operasi Pekat Semeru 2024 Rabu sore (12/3/25)

Ops Pekat Semeru 2025, 197 Tersangka Diamankan

SIDOARJO - Dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan selama bulan Ramadan, Polresta Sidoarjo kembali menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum. Hal ini diwujudkan melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Ops Pekat) Semeru 2025 yang berlangsung selama 12 hari, mulai 26 Februari hingga 9 Maret 2025. Operasi ini berhasil mengungkap ratusan kasus yang meresahkan masyarakat.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Christian Tobing, menjelaskan operasi ini bertujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) yang kondusif, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sasaran utama operasi ini meliputi penyalahgunaan bahan peledak (handak), narkoba, premanisme, prostitusi, pornografi, perjudian, dan peredaran minuman keras (miras) ilegal.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, kami secara intensif melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum," ujar Kapolresta Sidoarjo, Rabu sore (12/3/2025).

Dalam rilisnya, Kapolresta Sidoarjo menjelaskan bahwa operasi ini berhasil menangkap 197 tersangka dengan rincian sebagai berikut:judi Online: 24 orang,judi konvensional: 18 orang,prostitusi: 3 orang,penyalahgunaan bahan peledak (Handak): 1 orang,premanisme: 57 orang,miras Ilegal: 84 orang,narkoba: 10 orang.

"Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita ribuan barang bukti, termasuk 3.109 botol atau 2.472 liter minuman keras ilegal dari berbagai merek," terang Kombes Pol. Christian Tobing.

Selama operasi berlangsung, berbagai barang bukti berhasil diamankan, di antaranya:22 unit handphone yang digunakan untuk transaksi perjudian online.Uang tunai Rp2.353.000 dari berbagai kasus perjudian.3 set kartu remi, 3 stik biliar, 2 set bola biliar, dan 1 tatakan bola,48,76 gram sabu-sabu dan 4.726 butir pil LL.

Kapolresta Sidoarjo menjelaskan para pelaku memiliki beragam modus operandi. Diantaranya menggunakan aplikasi perjudian digital dengan uang asli sebagai taruhan, permainan kartu remi atau biliar dengan taruhan uang. Mempromosikan layanan pekerja seks komersial melalui media sosial, menjual minuman keras tanpa izin resmi dan menyimpan dan membuat petasan tanpa dokumen sah.

Kapolresta Sidoarjo menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli dan razia guna mencegah kejahatan serupa terjadi kembali.

"Kami mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan perjudian, narkoba, atau peredaran miras ilegal," tegasnya.

Operasi Pekat Semeru 2025 menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, terutama di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri.●Loe

DUTA

Safari Ramadan Kapolresta Sidoarjo

Jadi Momen Sampaikan Pesan Kamtibmas

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing foto bersama dengan takmir masjid usai safarai ramadan.

Sidoarjo, Memorandum

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing menggiatkan safari ramadan. Tujuannya, menjalin kedekatan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif.

Seperti yang dilakukan ketika mengunjung Masjid Al Ikhlas di Jalan Raya Cemengkalang, Kamis (13/3). Ada beberapa hal yang disampaikannya kepada takmir masjid.

Pesan kamtibmas yang disampaikan antara lain, menguatkan toleransi dan kerukunan antarumat, menjaga keamanan tempat ibadah dari bahaya kriminalitas serta menjamin rasa nyaman jemaah dalam menjalankan ibadah. Kapolresta berharap ramadan dapat dijadikan momentum untuk saling menghormati, guyub rukun, dan toleran antaragama.

"Agar takmir masjid dapat mengajak jemaah untuk menjadikan ramadan sebagai kesempatan untuk menguatkan kerukunan dan toleransi. Mari berlatih untuk saling menebar kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama," ajaknya.

Ia juga mengajak tokoh agama dan masyarakat guna membantu peran kepolisian. Yakni turut serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama ramadan. **(sud/jok/epe)**

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPBD SIDOARJO

SUSAH TERLEPAS: Petugas Rescue Damkar Pos Sidoarjo Kota berupaya melepas cincin di jari tangan ODGJ yang tersangkut kemarin (13/3).

Cincin Tersangkut, ODGJ Datangi Damkar

SIDOARJO - Markas Damkar Pos Sidoarjo Kota kemarin (13/3) didatangi ODGJ. Pria berinisial MS, 50, itu diantar saudaranya ke Damkar Pos Sidoarjo Kota untuk melepas cincin yang bertahun-tahun tersangkut di jarinya.

Danru Rescue Regu 2 BPBD Sidoarjo Sofyan Pandu mengatakan, cincin di jari MS sudah tersangkut cukup lama bahkan hingga karatan dan membuatnya kesakitan. "Cincin itu sudah berusaha dilepas oleh korban sampai jarinya bengkak. Kami cukup kesulitan melepas

karena sudah bengkak dan ada lukanya," ungkapnya. Sekitar dua jam cincin baru bisa dilepaskan. **(eza/uzi)**

Jawa Pos

Pengendara Sering Lawan Arus di Frontage Road

Polisi Ancam Tilang Pelanggar

SIDOARJO - Dishub Sidoarjo memasang rambu larangan kendaraan melaju ke arah utara (Surabaya) di sejumlah titik frontage. Sebab jalan itu satu arah. Namun, berdasarkan pengamatan, masih banyak pelanggar yang nekat menerobos.

Kadishub Sidoarjo Benny Airlangga menyayangkan fenomena itu. Resikonya berbahaya. "Bisa menimbulkan kecelakaan," ujarnya kemarin (13/3). Dia menambahkan, rambu itu sengaja dipasang dengan pertimbangan keamanan pengendara. Sebab, frontage road hanya boleh dilewati kendaraan yang melaju ke arah selatan. Jajarannya pun sering melakukan razia gabungan dengan polisi. "Kalau ada petugas, mereka tertib. Setelah ditinggal, melanggar lagi," keluhnya.

Kanit Kamsel Polresta Sidoarjo Iptu Ali Mubarok mengaku hampir setiap hari pihaknya menegur pelanggar di frontage road. Upaya persuasif ditempuh dengan harapan bisa menggugah hati mereka dan tidak mengulang pelanggaran. Belum sampai diberi surat tilang. Namun, kebanyakan pelanggar yang ditegur melontarkan alasan identik. Mereka ingin lebih cepat sehingga tidak mau memutar lewat jalan raya. "Kami awasi setiap hari. Jika tidak berubah akan dilakukan tindakan lebih tegas berupa tilang," tuturnya. **(edi/uzi)**

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PEMKAB SIDOARJO

KOMITMEN: Bupati Sidoarjo Subandi bersama Kepala Bappeprov Jatim Yasin (kiri) menandatangani hasil kesepakatan Musrenbang di Pendopo Delta Wibawa kemarin (13/3).

Tahun Depan, Pemkab Fokus Pemerataan Pembangunan

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Pemerataan pembangunan jadi salah satu fokusnya.

Nantinya, RKPD akan jadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 hingga 2030.

Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan, RPMJD memiliki peran sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Karena juga akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," katanya.

Subandi menjelaskan bahwa visi utamanya adalah menata desa dan membangun kota. Konsep tersebut menekankan keseimbangan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan agar saling berkesinambungan. Pembangunan harus merata baik di wilayah desa maupun kota.

"Dengan itu Sidoarjo diharapkan bisa menjadi kota metropolitan inklusif serta dapat memberikan jaminan kesetaraan bagi seluruh golongan masyarakat," ujarnya. Untuk mencapai hal tersebut, Subandi akan berupaya melakukan peningkatan daya saing dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya.

Harapannya, Sidoarjo mampu menjadi daerah yang unggul dalam berbagai sektor ekonomi. "Keberlanjutan pembangunan menjadi komitmen jangka panjang," ujarnya.

Di sisi lain, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menjelaskan, Pemkab sudah memetakan pembangunan di Sidoarjo tahun depan. Mulai infrastruktur, lingkungan, hingga peningkatan kualitas masyarakat. "Kita harapkan ini jadi acuan untuk merencanakan Sidoarjo baik ke depan," katanya. **(eza/uzi)**

HASIL MUSRENBANG SIDOARJO

ILUSTRASI: JOKO TRIONO/AI/JAWA POS

- Menata kawasan strategis nasional termasuk wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila
- Menata desa dan membangun kota
- Peningkatan daya saing dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya
- Peningkatan kualitas masyarakat dan lingkungan
- Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata
- Mewujudkan tata kelola yang bersih dan layanan prima

SUMBER: PEMKAB SIDOARJO

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home • 2025 • Maret • 13 • Tolak Keputusan Kemenpan RB, Ratusan Honorer Wadul Wakil Rakyat

LEGISLATIF

Tolak Keputusan Kemenpan RB, Ratusan Honorer Wadul Wakil Rakyat

Admin — 13/03/2025

Share

Read Time: 2 Minute, 3 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Puluhan tenaga guru dan teknis yang sudah lolos menjadi PPPK dan tinggal menunggu SK pengangkatan, melakukan aksi di gedung DPRD Sidoarjo menolak Kemenpan RB nomor 1043 soal penyesuaian jadwal seleksi CASN, Kamis (13/3/2025).

Liputan Sidoarjo.com

Meskipun hanya dilakukan dengan duduk duduk, namun aksi mereka ini mendapat perhatian wakil rakyat, yang segera menerima mereka untuk dialog.

Dua ketua komisi yakni H.Rizza Ali Faizin (ketua komisi A), dan H.Damroni Chudlori (ketua komisi D) bersama anggota komisi D Tarkit Erdianto, H.Sutadji, Hj Fitrotin Hasanah dan Rizal Fuadi anggota komisi A, secara terbuka menerima kedatangan puluhan tenaga honorer di ruang pertemuan Bamus.

Dalam pertemuan itu, Araftu Rohma salah satu perwakilan, mengaku aksi ini dilakukan sebagai bentuk kegalauan mereka, atas keputusan penundaan pengakatan tenaga honorer menjadi PPPK karena turunnya SK Kemenpan 1043.

"Kita sudah menunggu cukup lama untuk bisa menjadi PPPK ini dan berharap bulan Ramadhan ini bisa resmi diangkat. Namun ternyata harapan itu tertunda lagi," ujar Araftu

Araftu mengaku, mereka sudah melakukan konsultasi PGRI, Dikmas hingga BKD untuk persoalan ini.

Namun karena semua buntu, akhirnya gedung dewan menjadi tumpuan akhir.

"Kita berharap suara kami bisa diperjuangkan bapak-bapak dewan ke pusat, untuk
Mencabut dan mendesak Kemenpan nomor 1043 itu dicabut dan dikembalikan keputusan awal," terang Araftu.

Guru yang juga kader Fatayat ini menyatakan, salah satu point yang juga ingin diketahui para honorer ini, adalah kesiapan Pemkab dalam memberikan gaji kepada PPPK.

Karena dalam pertimbangan turunnya SK Kemenpan itu, adalah banyak Kabupaten yang minta adanya penundaan.

"Apakah Kabupaten Sidoarjo ini salah satunya yang minta penundaan, itu yang ingin kami ketahui," tanya Araftu.

Mendapat keluhan ini, H.Rizza Ali Faizin menjamin Kabupaten Sidoarjo bukan salah satu kabupaten yang ingin penundaan.

Karena menurut Rizza, logikanya ketika sudah siap merekut PPPK, maka anggaran gaji sudah siap.

"Saya yakin Sidoarjo ini sudah siap memberikan gaji kepada PPPK yang lolos. Penundaan ini karena merupakan keputusan pusat," ujar Rizza.

Sementara itu H.Damroni Chudlori ketua komisi D menyatakan mendukung perjuangan para honorer ini untuk segera diangkat menjadi PPPK.

Bahkan jika diminta tanda tangan untuk dukungan, maka para anggota dewan pasti semua mendukung.

"Kita siap tanda tangan pendidikan, karena mestinya kebijakan penundaan ini memang tidak digeneralisir untuk semua kabupaten. Sidoarjo sudah siap anggarannya untuk gaji PPPK, namun karena ini kebijakan pusat, maka kita harus menyesuaikan. Namun intinya kita minta teman-teman untuk menginfirmasikan surat resmi untuk audensi lagi, sehingga kita bisa agendakan secara penuh dengan mengundang OPD terkait untuk solusi terbaik," ujar Damroni menutup diskusi. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com

Kontroversi Pembangunan Taman Bahu Jalan GDS, Kepala DLHK Sidoarjo : Sesuai Prosedur Dan Sudah di Audit BPK

by Radar Jatim — 13 Maret 2025 in Infrastruktur 0

Proyek pembangunan taman bahu jalan di area Stadion Gelora Delta Sidoarjo tahun 2023 lalu yang dilaporkan LSM Gerah ke Kejari Sidoarjo.

88 VIEWS

SIDOARJO (RadarJatim.id) – Proyek pembangunan taman bahu jalan di area Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS) tahun 2023 yang menuai kontroversi ditengah-tengah masyarakat itu dibantah oleh Dr. Moh. Bahrul Amig, S.Sos., MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo.

Moh. Bahrul Amig mengatakan bahwa proyek pembangunan taman bahu jalan yang menelan anggaran sebesar Rp 6.236.033.379 itu sudah sesuai dengan prosedur, Rabu (12/03/2025).

"Tuduhan itu tidak benar, karena pembangunan (proyek bahu jalan, red) sudah sesuai dengan prosedur," katanya.

Bahkan menurut Bahrul Amig bahwa pembangunan proyek bahu jalan di area GDS tahun 2023 itu sudah pernah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan kekurangannya pun sudah dikembalikan.

"Sudah di audit oleh BPK dan (kekurangannya, red) sudah kami kembalikan," tegas Bahrul Amig.

Terkait pembangunan taman bahu jalan di area GDS itu, sudah pernah dilakukan rapat koordinasi di kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo bersama dengan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas yang didampingi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atau Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

“Kita juga sudah melakukan rapat koordinasi di (kantor, red) Sekda dengan pihak kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas serta didampingi oleh APH,” terangnya.

Sebagaimana yang telah diberitakan oleh RadarJatim.id beberapa waktu lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Hebat (LSM Gerah) telah membuat laporan ke Kejari Sidoarjo terkait proyek pembangunan taman bahu jalan di area GDS pada Oktober 2024 lalu.

LSM Gerah menilai bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi serta konspirasi jahat antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas terkait pengadaan barang dan jasa dalam proyek pembangunan taman bahu jalan di area GDS itu.

Menurut analisa dari Gerah bahwa proyek pembangunan taman bahu jalan di area GDS yang dikerjakan oleh CV. Tirta Amarta Anugerah dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PA/11.10.04/438.5.11/2023 itu, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan pemufakatan jahat yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.

Indikator pertama, adanya perubahan desain dan penambahan item baru berdasarkan berita acara Nomor 027/23.10.6/438.511/2023 tanggal 23 Oktober 2023. Dimana item *street lamp type* 1 tinggi 3,58 m dengan harga Rp 4.756.026/unit diganti dengan pemasangan lampu *bollard* type 2 dengan harga Rp 2.113.000/unit sebanyak 619 unit. Perubahan desain dan volume pekerjaan itupun tidak melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk dikaji tim teknis terlebih dahulu.

Indikator kedua, DLHK Sidoarjo membuat berita acara rapat koordinasi tindak lanjut pemeliharaan taman bahu jalan yang di pimpin langsung oleh Kepala DLHK dengan Nomor 000.3/267.1/438.5.11/2024 pada tanggal 26 Juli 2024 yang isinya diduga sangat menguntungkan kontraktor pelaksana dan diduga sebagai strategi PPK/KPA/PA untuk menyiasati pekerjaan yang belum selesai dengan menggunakan anggaran pemeliharaan.

Indikator ketiga, berita acara tersebut dikeluarkan setelah tanggal penyerahan pertama selesai atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan penambahan waktu 50 hari kalender kerja yang diduga merupakan adendum pekerjaan.

Indikator keempat, adanya dugaan wanprestasi karena pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja yang disepakati dan pekerjaan melewati tahun anggaran dan perpanjangan waktu 50 hari kerja sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Dari indikator dan hasil investigasi LSM Gerah media dilapangan, menemukan dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek pembangunan taman bahu jalan di area GDS dengan belum dikerjakannya pemasangan keramik sebanyak 72 meter persegi, kekurangan pemasangan lampu bollard type 2 sebanyak 323 unit dari 619 unit sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kekurangan pemasangan street lamp type 2 tinggi 3,68 meter 22 unit dari 119 unit yang harus terpasang sesuai RAB. (**mams**)

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Gelar Musrenbang RKPD 2026, Petakan Arah Pembangunan

March 13, 2025 - 107 Views

Progres Jatim.com Sidoarjo-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, Kamis 13/03/2025 di Pendopo Delta Wibawa

Dalam pembangunan Daerah akan terlaksana dengan lancar seauai tentunya dengan dukungan semua stake holder serta masyarakat Oleh karena itu dengan mengajak

seluruh perangkat daerah untuk menggali potensi yang ada, serta memohon dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Sidoarjo sebagai metropolitan yang inklusif dan kompetitif.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi S.H. M.Kn yang mana dalam sambutannya mengatakan Musrenbang RKPD dan RPJMD memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan pedoman dalam penyusunan APBD dan tolok ukur pencapaian kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

PROGRESJATIM.COM
Jendela Informasi Anda

Dan sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju dan sejahtera, kami telah menyusun visi dan misi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, di mana Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari aglomerasi Kawasan Strategis Nasional yang membentuk kawasan metropolitan, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Visi dan misi kami periode 2025-2030 telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045, dan tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.

"Penataan kawasan perdesaan dan perkotaan menuju Sidoarjo sebagai metropolitan inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Penataan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan,"katanya

Ia pun melanjutkan bahwa metropolitan inklusif diharapkan menjamin kesetaraan, keadilan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Daya saing diartikan sebagai dinamika yang substansial dengan keunggulan pengelolaan sumber daya secara optimal. Kesejahteraan dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Berkelanjutan berarti terjaganya kelestarian kehidupan untuk generasi mendatang. Untuk mewujudkan visi tersebut memiliki lima misi utama, yaitu :

a. Memantapkan pertumbuhan ekonomi inklusif merata bagi pelaku ekonomi menitikberatkan pada kebijakan perekonomian inklusif energi baru terbarukan dan kemandirian pedesaan

b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima dengan mengandalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan terus berinovasi dan mengoptimalkan digitalisasi

c. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas merata dan mendukung pembangunan sektor potensial dan sektor strategis berkelanjutan dengan menekankan pada infrastruktur inklusif pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana

d. Mewujudkan masyarakat yang religius setara tentram nyaman dimulai dari meningkatkan kualitas keluarga dan kerukunan beragama sehingga menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat

"Untuk merealisasikan program pembangunan RKPD 2026 serta visi dan misi RPJMD 2025-2029, diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan daerah, transfer pusat ke daerah, dan partisipasi dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Sebagai upaya meringankan beban fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk mengusulkan program kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Usulan pembangunan tersebut merupakan bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ucapnya

Mengakiri sambutannya ia menyampaikan partisipasi aktif dan masukan konstruktif dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

Sebelum acara dilanjutkan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 yang menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Ir. Muhammad Yasin, MSI. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati S.Km., M.Kes terlebih dahulu diadakan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 dan berita acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.(GUS)

Pemerintah

Petakan Arah Pembangunan Sidoarjo Yang Lebih Maju dan Sejahtera, Pemkab Gelar Musrenbang RKPD 2026

Media Sorot Mata 13 Maret 2025

SIDOARJO/MEDIASOROTMATA.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, Kamis (13/03/2025) di Pendopo Delta Wibawa

Dalam pembangunan Daerah akan terlaksana dengan lancar seaual tentunya dengan dukungan semua stake holder serta masyarakat Oleh karena itu dengan mengajak seluruh perangkat daerah untuk menggali potensi yang ada, serta memohon dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Sidoarjo sebagai metropolitan yang inklusif dan kompetitif.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi S.H. M.Kn yang mana dalam sambutannya mengatakan Musrenbang RKPD dan RPJMD memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan pedoman dalam penyusunan APBD dan tolok ukur pencapaian kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dan sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju dan sejahtera, kami telah menyusun visi dan misi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, di mana Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari aglomerasi Kawasan Strategis Nasional yang membentuk kawasan metropolitan, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Visi dan misi kami periode 2025-2030 telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045, dan tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.

"Penataan kawasan perdesaan dan perkotaan menuju Sidoarjo sebagai metropolitan inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Penataan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan,"katanya

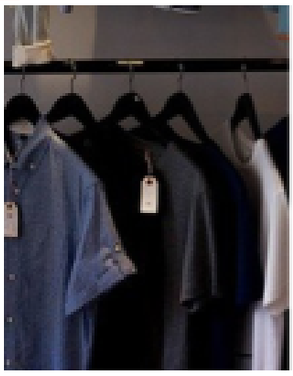

Ia pun melanjutkan bahwa metropolitan inklusif diharapkan menjamin kesetaraan, keadilan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Daya saing diartikan sebagai dinamika yang substansial dengan keunggulan pengelolaan sumber daya secara optimal. Kesejahteraan dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Berkelanjutan berarti terjaganya kelestarian kehidupan untuk generasi mendatang. Untuk mewujudkan visi tersebut memiliki lima misi utama, yaitu :

a. Memantapkan pertumbuhan ekonomi inklusif merata bagi pelaku ekonomi menitikberatkan pada kebijakan perekonomian inklusif energi baru terbarukan dan kemandirian pedesaan

b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima dengan mengandalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan terus berinovasi dan mengoptimalkan digitalisasi

c. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas merata dan mendukung pembangunan sektor potensial dan sektor strategis berkelanjutan dengan menekankan pada infrastruktur inklusif pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana

d. Mewujudkan masyarakat yang religius setara tentram nyaman dimulai dari meningkatkan kualitas keluarga dan kerukunan beragama sehingga menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat

"Untuk merealisasikan program pembangunan RKPD 2026 serta visi dan misi RPJMD 2025-2029, diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan daerah, transfer pusat ke daerah, dan partisipasi dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Sebagai upaya meringankan beban fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk mengusulkan program kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Usulan pembangunan tersebut merupakan bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ucapnya

Mengakiri sambutannya ia menyampaikan partisipasi aktif dan masukan konstruktif dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

Sebelum acara dilanjutkan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 yang menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Ir. Muhammad Yasin, MSI. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati S.Km., M.Kes terlebih dahulu diadakan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 dan berita acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. (Nuri)

DPC PKB Sidoarjo Bagi-Bagi Takjil Barokah dan Safari Ramadhan 1466 H

14 Maret 2025 06:27

Fathur Roziq, Fathur Roziq
Redaksi Ketik.co.id

Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih memberikan takjil untuk pengendara motor di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Sidoarjo pada Kamis (13 Maret 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan

Aa

KETIK, SIDOARJO – DPC PKB Sidoarjo bagi-bagi takjil Ramadhan. Seperti simbol lebah dalam logo Partai Berlambang Bola Dunia dengan 9 Bintang itu, pengurus dan kader-kader PKB Sidoarjo berbagi kebahagiaan dan keberkahan pada Kamis (13 Maret 2025). Masyarakat menyambutnya antusias.

Bagi-bagi takjil Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo berlangsung di Jalan Soenandar Priyo Sudarmo, Sidoarjo. Tak jauh dari kantor DPC PKB Sidoarjo di Jalan Erlangga. Total ada 500 paket takjil yang dibagi.

Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih memimpin pembagian takjil yang diiringi musik patrol itu. Jajaran pengurus, badan otonom, maupun anggota Fraksi PKB di DPRD Sidoarjo juga hadir. Ada Dhamroni Chudlori, H Usman MKes, Rizza Ali, Muzayyin, M. Rafi Wibisono, Elok Suciati, dan lain-lain.

Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih memimpin pembagian takjil yang diiringi musik patrol itu. Jajaran pengurus, badan otonom, maupun anggota Fraksi PKB di DPRD Sidoarjo juga hadir. Ada Dhamroni Chudlori, H Usman MKes, Rizza Ali, Muzayyin, M. Rafi Wibisono, Elok Suciati, dan lain-lain.

Ketua Fraksi PKB di DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyerahkan dua takjil untuk Nenek Suminah yang mengeluh tidak bisa jalan. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Senyum ramah menyertai bagi-bagi makanan pembuka Puasa Ramadhan tersebut. Ratusan pengendara berhenti sejenak. Menyambut uluran tangan pengurus dan kader PKB Sidoarjo. Satu per satu paket takjil diserahkan. Pengendara roda dua maupun roda empat pun berebutan.

"Maturnuwun, terima kasih takjilnya," ungkap beberapa pengendara setelah menerima takjil.

Warga kampung sekitar pun mendekat. Dapat bagian takjil juga. Seorang lansia terlihat duduk di pinggir jalan. Perempuan bernama Suminah, 55, itu hanya menonton keramaian dari balik tenda plastik. Duduk sendirian. Menatap orang-orang yang bisa mendekat untuk dapat takjil.

Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Trenggalek Subadianto Safari Ramadhan bersama Forkopimda di Desa Karangsuko

Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori ternyata melihatnya. Dia lantas menghampiri Suminah dan menawarkan takjil. Dhamroni memberikan dua takjil sesuai permintaan Suminah yang mengeluh sakit asam urat dan tidak bisa jalan tersebut.

"Buat suami, Pak," ujar Suminah yang mengaku asal Banyuwangi dan sudah 23 tahun menetap di Sidoarjo itu. Dia tampak semringah. Hanya dalam beberapa menit, ratusan paket takjil itu habis. Ludes.

Anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo H Usman MKes mengulurkan takjil gratis ke seorang pengendara. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, bagi-bagi takjil itu selalu dilakukan setiap Ramadhan. Bisa dua, tiga, bahkan empat kali selama Ramadhan.

"Jadi, kegiatan ini akan terus berlanjut," ungkap Abdillah Nasih yang juga ketua DPRD Sidoarjo tersebut.

Dalam Ramadhan 1466 H ini, lanjut dia, DPC PKB Sidoarjo merencanakan lima kali bagi-bagi takjil gratis. Tidak hanya itu. Ada pula kegiatan Safari Ramadhan bersama jajaran pengurus DPAC PKB Se-Sidoarjo dan DPW PKB Jatim. Dijadwalkan, kegiatan itu berlangsung maraton mulai Jumat (15 Maret 2025).

Baca Juga:
Dinas Perikanan Trenggalek Bagikan 20 Paket Gemarikan di Mening Deh

"Kami akan membagikan bingkisan Lebaran kepada teman-teman pejuang PKB dan kader-kader terbaik di Sidoarjo," terang Abdillah Nasih.

"Kami akan membagikan bingkisan Lebaran kepada teman-teman pejuang PKB dan kader-kader terbaik di Sidoarjo," terang Abdillah Nasih.

Jajaran pengurus DPC PKB Sidoarjo beserta badan otonomnya berbagi takjil untuk masyarakat Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Masih ada lagi kegiatan berbagi kebahagiaan dan keberkahan oleh DPC PKB Sidoarjo. PKB Sidoarjo akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan disabilitas. Agendanya pada pekan terakhir Ramadhan ini.

Agar lebih afdhol, DPC PKB Sidoarjo akan bersafari mengunjungi kiai-kiai dan ulama yang sekama ini telah mendukung dan mendoakan PKB Sidoarjo.

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Puluhan Orang Perwakilan CASN P3K Geruduk Kantor DPRD Sidoarjo, Tuntut SE Menpan RB Dicabut

by Radar Jatim — 14 Maret 2025 in Pemerintahan 0

Puluhan orang yang mewakili CASN P3K dari 18 kecamatan mendatangi Kantor DPRD Sidoarjo terkait terbitnya SE Menpan RB.

39 VIEWS

SIDOARJO (RadarJatim.id) – Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tentang penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) membuat ratusan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Sidoarjo yang telah lulus seleksi menjadi galau atau resah dan gelisah.

Untuk itu, lebih dari 70 orang Calon P3K dari tenaga guru dan tenaga teknis lainnya mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo untuk menyampaikan tuntutannya terkait terbitnya SE Menpan RB tersebut, Kamis (13/03/2025).

Kedatangan puluhan orang Calon P3K yang mewakili teman-temannya dari 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo itu ditemui langsung oleh H. Rizza Ali Faizin selaku Ketua Komisi A dan H. Damroni Chudlori, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo.

Selain ditemui oleh dua orang pimpinan komisi tersebut, tampak hadir pula Rizal Fuady selaku anggota Komisi A dan beberapa anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, seperti H. Taskit Erdianto, H. Sutadji, dan Hj. Fitrotin Hasanah.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Arofatul Rohma selaku koordinator mengatakan bahwa kehadiran mereka ke Kantor DPRD Sidoarjo sebagai bentuk kegalauan setelah terbitnya SE Menpan RB terkait penundaan CASN.

Untuk itu, ia bersama teman-temannya meminta dukungan dari wakil-wakil mereka di DPRD Sidoarjo untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah pusat.

“Sebelumnya kami mohon maaf kepada bapak dan ibu (anggota DPRD Sidoarjo, red). Kami datang kemari, karena kami galau kepada siapa harus mengadu terkait nasib kami. Kami mohon bapak dan ibu bisa menyampaikan suara kami ke (pemerintah, red) pusat agar SE Menpan RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 itu dicabut,” kata Arofatul dihadapan para anggota DPRD Sidoarjo.

Banyak dari mereka yang masa pengabdiannya hingga puluhan tahun. Namun ketika lolos seleksi menjadi P3K, muncul SE Menpan RB yang menunda pengangkatannya.

Selain itu, ada beberapa temannya yang sudah terlanjur mengundurkan diri sebagai tenaga honorer terpaksa harus menganggur setelah terbitnya SE Menpan RB tersebut. Sedangkan mereka mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya.

“Ada teman kami yang terlanjur mengundurkan diri sebagai guru honorer di sekolah swasta. Ketika dia ingin kembali mengajar, ditolak oleh pihak sekolah, karena dianggap sebagai *tambal butuh* saja,” sampainya.

Guru honorer yang sudah mengabdi selama 17 tahun di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sedati itu juga menanyakan bahwa terbitnya SE Menpan RB tersebut atas usulan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Sidoarjo.

“Apa benar terbitnya SE Menpan RB itu berdasarkan usulan dari daerah-daerah, termasuk Sidoarjo agar pengangkatan CASN itu ditunda?,” tanyanya.

Mendengar pertanyaan dari para CASN P3K itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bukanlah termasuk dari daerah-daerah yang mengusulkan penundaan.

“Kami tegaskan disini bahwa Sidoarjo tidak pernah mengusulkan penundaan (pengangkatan CASN, red). Setelah diumunkan terkait rekrutmen atau seleksi CASN, sudah kami siapkan semuanya, termasuk anggaran atau gajinya,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan H. Damroni Chudlori bahwa selama ini Pemkab Sidoarjo kekurangan banyak tenaga kerja atau ASN, jadi tidak mungkin mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan penundaan pengangkatan CASN.

Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo sangat mampu untuk menggaji seluruh tenaga kerja atau pegawai dilingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Sidoarjo tidak ada persoalan dengan itu, juga *eman-eman* kalau (anggarannya, red) tidak terserap akan menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, red),” jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusan dukungan DPRD Sidoarjo terhadap nasib CASN P3K itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Kecamatan Tulangan itu menyatakan kesiapannya untuk memberikan tanda tangan di surat penolakan atau peninjauan yang ditujukan kepada Menpan RB.

“Silahkan buat surat penolakan atau peninjauan kembali yang ditujukan ke Menpan RB, kami siap menanda tanganinya. Karena menurut kami, legal formalnya sudah sah, tinggal menunggu pelantikannya saja,” pungkasnya. (**mams**)